



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Raya El Tari Nomor 52  
KUPANG

Kupang, 17 - 07 - 2024

Nomor : BU.700/10 /Inspektorat/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyampaian LHKPN Tahun Pelaporan  
bulan April, Mei, dan Juni 2024.

Yth. Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT  
masing-masing (daftar terlampir)  
di -  
Tempat

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2020 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan hasil rekapitulasi penyampaian LHKPN per tanggal 30 Juni 2024 tingkat kepatuhan Wajib Lapor (WL) baru mencapai 96,60% di mana yang telah melapor LHKPN sebanyak 1024 WL dari 1060 WL sedangkan yang belum melapor sebanyak 36 orang, maka disampaikan bahwa :

1. Per tanggal 31 Maret 2024
  - a. Tingkat kepatuhan Wajib Lapor (WL) LHKPN sampai dengan 31 Maret 2024 mencapai 95,57% di mana yang telah melapor LHKPN Tahun 2023 sebanyak 1013 WL sedangkan yang belum melapor sebanyak 47 WL.
  - b. Rekapitulasi per Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT terkait perkembangan pelaporan LHKPN per tanggal 31 Maret 2024 sesuai Lampiran I.
  - c. Rekanan ASN yang telah melapor LHKPN Lingkup Pemerintah Provinsi NTT per tanggal 31 Maret 2024 sesuai Lampiran V.
  - d. Rekanan ASN yang belum melapor LHKPN Lingkup Pemerintah Provinsi NTT per tanggal 31 Maret 2024 sesuai Lampiran VI.
2. Per tanggal 30 April 2024
  - a. Tingkat kepatuhan Wajib Lapor (WL) LHKPN sampai dengan 30 April 2024 mencapai 96,60% di mana yang telah melapor LHKPN Tahun 2023 sebanyak 1024 WL dengan yang belum melapor sebanyak 36 WL.
  - b. Rekapitulasi per Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT terkait perkembangan pelaporan LHKPN per tanggal 30 April 2024 sesuai Lampiran II.

- c. Rekapan ASN belum melapor LHKPN per Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT per tanggal 30 April 2024 sesuai Lampiran VII.
- 3. Per tanggal 31 Mei 2024
  - a. Tingkat kepatuhan Wajib Lapor (WL) LHKPN sampai dengan 31 Mei 2024 mencapai 96,60% di mana yang telah melapor LHKPN Tahun 2023 sebanyak 1024 WL dengan yang belum melapor sebanyak 36 WL.
  - b. Rekapitulasi Per Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT terkait perkembangan pelaporan LHKPN per tanggal 31 Mei 2024 sesuai Lampiran III.
  - c. Rekapan ASN belum melapor LHKPN per Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT per tanggal 31 Mei 2024 sesuai Lampiran VIII.
- 4. Per tanggal 30 Juni
  - a. Tingkat kepatuhan Wajib Lapor (WL) LHKPN sampai dengan 30 Juni 2024 mencapai 96,60% di mana yang telah melapor LHKPN Tahun 2023 sebanyak 1024 WL dengan yang belum melapor sebanyak 36 WL.
  - b. Rekapitulasi per Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT terkait perkembangan pelaporan LHKPN per tanggal 30 Juni 2024 sesuai Lampiran III.
  - c. Rekapan ASN belum melapor LHKPN per Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT per tanggal 30 Juni 2024 sesuai Lampiran VIII.
- 5. Seluruh wajib LHKPN yang belum menyampaikan dokumen asli Lampiran Surat Kuasa atas nama Penyelenggara Negara /Wajib LHKPN, Pasangan dan Anak Tanggungan yang berusia lebih dari 17 tahun (bertanda tangan diatas materai Rp.10.000) agar mengirimkan kekurangan dokumen tersebut maksimal 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan LHKPN yang disampaikan masih perlu dilengkapi oleh Wajib LHKPN. Dalam hal Wajib LHKPN belum menyampaikan dokumen sampai dengan waktu yang telah ditentukan, maka LHKPN yang disampaikan tidak dapat diproses lebih lanjut dan yang bersangkutan dianggap belum menyampaikan LHKPN;
- 6. Pimpinan Perangkat Daerah agar menyampaikan Rekapitulasi ASN yang telah melapor LHKPN Tahun 2024 kepada Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur paling lambat tanggal 15 Juli 2024;
- 7. Bagi Wajib Lapor LHKPN hingga tanggal 30 Juni 2024 belum melaporkan LHKPN Tahun 2024 maka akan dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. Tidak diberikan Tunjangan Perbaikan Penghasilan;
  - b. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
  - c. Pembebasan dari Jabatan Struktural.



8. Untuk Informasi lebih lanjut, melalui Klinik Konsultasi Pengawasan No. HP 081238395544, menghubungi Bernad Kedang (Admin LHKPN) No. HP 081337331568.

Demikian untuk maklum, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Gubernur Nusa Tenggara Timur

Sekretaris Daerah

u.b

Asisten Pemerintahan dan Kesra,





**Dra. Bernadeta Meriani Usboko, M.Si**

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP 196505161993032009

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Inspektur Provinsi NTT.

PARAF HIERARKI	
INSPEKTUR	
PLH SEKRETARIS	

**REKAP ASN YANG TELAH MELAPOR LHKAN  
BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI NTT  
PER 31 MARET 2024**

No	Nama	NIP	Unit Kerja	Tanggal Kirim
1	Maria Filomena Langoday, SE.	19780401 201001 2 005	Biro Perekonomian	04 Maret 2024
2	Agnes G. Rotuludji, S.Sos.	19730815 200701 2 022	Biro Perekonomian	16 Februari 2024
3	Yohanita Uto kabelen, SE.	19780626 201001 20006	Biro Perekonomian	27 Maret 2024
4	Arianca P.L Iapailaka, SE., MM	19790413 201212 2 001	Biro Perekonomian	25 Maret 2024
5	Yohana Fransisca, S.Kom	19880606 202012 2 006	Biro Perekonomian	15 Maret 2024
6	Meysiliani Sidi Bata, S.Kom	19970214 202202 2001	Biro Perekonomian	19 Februari 2024
7	Josevina Erllyn Hoinbala	19850627 201406 2 001	Biro Perekonomian	15 Februari 2024
8	Delila A.L.P. Saefatoe	19710910 199603 2 001	Biro Perekonomian	13 Februari 2024
9	Maria Enggelina Radjapono	19670601 199103 2 016	Biro Perekonomian	07 Februari 2024
10	Fidelis Selo	19670812 198903 1 011	Biro Perekonomian	13 Februari 2024
11	Hendrik J. Mone	19810718 200901 1 007	Biro Perekonomian	27 Maret 2024
12	Marthen Talelu	19660316 201406 1 004	Biro Perekonomian	13 Maret 2024
13	Yosy Kebkole	19670202 201406 1 002	Biro Perekonomian	13 Februari 2024
14	Godlief manus	19710107 201406 1 003	Biro Perekonomian	21 Februari 2024
15	Ipolita C. Ngare, SE., MM.	19770904 200012 2 002	Biro Perekonomian	16 Februari 2024
16	Sefri Maurits Tiason Nalle, S.Sos.	19700917 1999303 1 008	Biro Perekonomian	01 Maret 2024
17	Yohanes Meowatu, S.Sos	19791221 200112 1 008	Biro Perekonomian	27 Maret 2024
18	Jeny viktorina Ndapamerang S. Hut	19771012 200312 2 010	Biro Perekonomian	07 Februari 2024
19	Jeanette Dessy Deborah Thei, S.Pt.	19731201 200312 2 005	Biro Perekonomian	13 Februari 2024
20	Neneng W. Tufan, SE.	19770923 200012 2 003	Biro Perekonomian	13 Februari 2024
21	Patricia A.D. Wea, SE.	19650808 199303 2 011	Biro Perekonomian	25 Maret 2024
22	Maria Imelda Surya, SE.	19751116 201406 2 005	Biro Perekonomian	12 Februari 2024
23	Lingkan Ruru Tanan, S.Kom	19960715 202202 2001	Biro Perekonomian	07 Februari 2024
24	Theresia Y.B. Taluma. ST.	19790128 200903 2 002	Biro Perekonomian	04 Maret 2024
25	Paulus Histo Safrodan, SH., M.H	19760709 200604 1 019	Biro Perekonomian	07 Februari 2024
26	Wilfridus F.P. Wene, S.Kom	19880404 201903 1 002	Biro Perekonomian	07 Februari 2024
27	Drs.Alexander B. Koroh, MPM.	19700427 1999003 1005	Biro Perekonomian	18 Maret 2024
28	Aplonia Osi Jemat, S.Sos	19670710 200112 2 003	Biro Perekonomian	13 Februari 2024
29	Martha Moni Balu, SE	19690403 199203 2 017	Biro Perekonomian	13 Februari 2024
30	Hamidah Longso, SE.	19741217 200112 2 002	Biro Perekonomian	13 Februari 2024
31	Zefry G.N Donuisang, SE., M.Ec.Dev.	19691109 199903 1 008	Biro Perekonomian	04 Maret 2024
32	Ferdinand B.Manbait, SE., M.Ec.Dev	19810619 201001 1 013	Biro Perekonomian	11 Maret 2024

No	Nama	NIP	Unit Kerja	Tanggal Kirim
33	Agustina R.Padu Leba, S.Sos	19720801 199801 2 002	Biro Perekonomian	15 Maret 2024
34	Yohanes Nani, S.Pi., M.Si	19670913 199203 1 009	Biro Perekonomian	13 Februari 2024
35	Rudi Arman Adi, S.Pi	19690902 199703 1 008	Biro Perekonomian	09 Maret 2024

Total ASN yang melapor LHKAN sebanyak 35 orang



Inspektur

Stefanus F. Halla, S.T., M.M., CGCAE  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 197301052000121004